

**Proses Konsumsi Mengkomunikasikan Identitas dan Gaya Hidup**

Endah Murwani

**Otonomi Daerah Dan Komunikasi Politik Kandidat Anggota Parlemen Pemilu 2009**

*(Suatu Analisa Pemikiran Terhadap Affirmative Action, Kuota 30 Persen Keterwakilan Perempuan Di Parlemen)*

Umaemah Wahid

**Ahmadiyah Dalam Bingkai Pemberitaan Media (Analisis Semiotika Sosial)**

Afdal Makkuraga Putra

**Karakteristik Personal, Situasional Dan Peran Komunikasi Politik Pemangku Kepentingan Pada Pelaksanaan Kebijakan Perberasan**

*(Situational and Personal Characteristic and The Role of Political Communication of Interest Functionary on Rice Policy Implementation)*

Amiruddin Saleh

**Image Building Partai Politik Di Media Televisi**

*(Suatu Analisis Terhadap Citra Partai Politik Berbasis Nasionalis Pada Komunitas Nahdatul Ulama)*

Heri Budiarto

## Karakteristik Personal, Situasional dan Peran Komunikasi Politik Pemangku Kepentingan Pada Pelaksanaan Kebijakan Perberasan

*(Situational and Personal Characteristic and The Role of Political Communication of Interest Functionary in Rice Policy Implementation)*

Oleh : Amiruddin Saleh

### **Abstract**

*Rice in Indonesia as basic need has a strategic role especially in economic. Rice issues also playing a sensitive role on social and political security. Rice is also a prime food for the majority of Indonesian people; therefore need a good and right management from upper course up to lower course. The strong role of political communication become one of the way on the making of rice policy implementation especially by involving those interest functionary on rice.*

*This research was designed as survey research with descriptive correlation, respondent comprised of farmer organization, government, rice entrepreneur and house of representative. Quantitative analysis used by descriptive statistical and correlation analysis with rank Spearman correlation statistical test.*

*The role of political communication of farmer organization are on the middle category, government on strong category, rice entrepreneur on middle category and house of representative on middle category. At the personal characteristic of farmer organization on formal education, experiences and average income on farmer organization and house of representative correlated significant ( $p < 0,05$ ) with the role of political communication on rice policy implementation. At the situational characteristic on communication access of government and house of representative, political participation of all interest functionary are high significantly correlated ( $p < 0,01$ ) and only house of representative political perception that not correlate ( $p > 0,05$ ) with the role of political communication on rice policy implementation.*

*Mass media has their role as one of the information source which is considerably objective and public opinion on the subject of rice policy implementation has also considerably become one of intake correction. The choices of Political attitude at the current time are valuable to bring out cooperation and re-actualize strong and powerful policy implementation in the future.*

*Keywords: political communication, interest functionary, rice policy*

### **PENDAHULUAN**

#### **Latar Belakang**

Ketersediaan beras memerlukan penataan dan manajemen yang berbasis pada kemampuan sumberdaya masyarakat dalam negeri. Kebijakan perberasan dengan mekanisme impor telah memberi dampak dan konsekuensi politik yang tinggi bagi kemampuan dan kemandirian bangsa dalam pengadaan makanan pokok nasional. Kebijakan impor beras menjadi prokontra di tengah-tengah masyarakat, karena hal ini tidak sesuai dengan komitmen pemerintah merealisasikan kebijakan revitalisasi pertanian. Hal ini juga bertentangan dengan realitas tingginya jumlah penduduk yang menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian khususnya padi. Terjadinya kekurangan

beras dalam jumlah besar akan cepat mempengaruhi kondisi stabilitas sosial masyarakat. Pentingnya peranan beras terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara, mendorong kebijakan beras menjadi sorotan dan menjadi fokus perhatian publik. Pemerintah mengeluarkan pelaksanaan kebijakan perberasan, meliputi: penetapan harga pembelian pemerintah (HPP); mekanisme melakukan impor; subsidi benih dan pupuk; pengembangan teknologi; dan perbaikan infrastruktur pendukung (Deptan, 2004). Hal ini merupakan kebijakan politik yang dikeluarkan pemerintah untuk menjawab persoalan perberasan di dalam negeri. Sukses atau gagalnya kebijakan perberasan di Indonesia, sangat dipengaruhi oleh adanya informasi dan komunikasi yang diterima oleh para petani dan pemangku kepentingan lainnya. Berhasilnya Indonesia dalam swasembada beras di tahun 1984 juga merupakan salah satu peran komunikasi (Levis, 1996). Peran komunikasi politik menjadi sangat penting dalam menyampaikan kebijakan yang menyangkut kepentingan publik sebab diperlukan pengetahuan yang luas terutama proses pendekatan dalam penyampaian suatu maksud agar dapat diterima masyarakat (Budiharsono, 2003).

Lasswell dalam Arifin (2003) membuat formula komunikasi politik dengan siapa berkata apa, kepada siapa, melalui saluran apa dan bagaimana efeknya (*who says what, to whom, with what channel and with what effect*). Peran komunikasi politik pemangku kepentingan perberasan sangat menentukan dalam pelaksanaan kebijakan perberasan di mata publik. Peran komunikasi politik yang dilakukan pada akhirnya akan melahirkan kesimpulan politik atau sering disebut sikap politik.

Wilayah Indonesia masih memiliki potensi besar dalam pengembangan padi, di samping secara historis mampu berswasembada beras. Pelaksanaan implementasi instrumen kebijakan perberasan dengan baik dan berkelanjutan sesuai aturan, seperti penetapan HPP, ketepatan mekanisme melakukan impor, penerapan subsidi benih dan pupuk, pengembangan teknologi dan perbaikan infrastruktur pendukung akan mampu mengatasi masalah kekurangan beras di dalam negeri dan bahkan mampu ekspor. Pada tahap idealnya seharusnya Indonesia mampu memenuhi kebutuhan beras sendiri dan mengekspor dalam jumlah besar, apabila masalah kebijakan di atas dapat dibenahi, termasuk mengikis budaya impor beras. Pemerintah, petani, organisasi tani, pengusaha beras, komisi IV DPR dan masyarakat pengonsumsi beras tentu punya kepentingan suksesnya kebijakan tersebut. Terbangunnya peran komunikasi politik akan melahirkan konsensus politik bersama dalam menyikapi keadaan perberasan.

#### **Perumusan Masalah**

Berbagai studi dan hasil penelitian menunjukkan bahwa peran komunikasi politik dipengaruhi karakteristik personal, situasional dan perilaku komunikasi politik. Penelitian kali ini hanya melihat keterkaitan antara karakteristik personal dan situasional dengan

peran komunikasi politik pemangku kepentingan perberasan. Secara spesifik, beberapa pertanyaan penelitian dirumuskan sebagai berikut:

1. Seperti apa karakteristik personal dan situasional pemangku kepentingan perberasan?
2. Apa saja peran komunikasi politik pemangku kepentingan pada pelaksanaan kebijakan perberasan?
3. Sejauh mana hubungan antara karakteristik personal dan situasional dengan peran komunikasi politik pemangku kepentingan pada pelaksanaan kebijakan perberasan?

### Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan karakteristik personal dan situasional politik pemangku kepentingan perberasan.
2. Menjelaskan peran komunikasi politik pemangku kepentingan perberasan pada pelaksanaan kebijakan perberasan.
3. Menganalisis hubungan antara karakteristik personal dan situasional dengan peran komunikasi politik pemangku kepentingan pada pelaksanaan kebijakan perberasan.

### KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

Berikut pada Gambar 1 disajikan kerangka berpikir penelitian Peran Komunikasi politik Pemangku Kepentingan pada Pelaksanaan Kebijakan Perberasan.

Gambar 1. Keterkaitan antara peubah karakteristik personal, situasional dan peran komunikasi politik pemangku kepentingan pada pelaksanaan kebijakan perberasan



Dari Gambar1 dapat disusun hipotesis sebagai berikut:

- H<sub>1</sub> = Terdapat hubungan nyata antara karakteristik personal dengan peran komunikasi politik pemangku kepentingan perberasan pada pelaksanaan kebijakan perberasan.
- H<sub>2</sub> = Terdapat hubungan nyata antara karakteristik situasional dengan peran komunikasi politik pemangku kepentingan perberasan pada pelaksanaan kebijakan perberasan.

## METODE PENELITIAN

### Desain Penelitian dan Waktu Penelitian

Penelitian didesain sebagai penelitian survei yang bersifat deskriptif korelasional dengan kuesioner sebagai alat pengumpulan data pokok. Lokasi penelitian dilaksanakan di Jakarta, ditentukan secara sengaja (*purposive*). Penelitian ini dilakukan bulan Mei sampai Desember 2007.

### Populasi dan Sampel

Populasi penelitian adalah para pemangku kepentingan perberasan, pernah terlibat dalam perumusan kebijakan perberasan, berperan dalam mempengaruhi kebijakan perberasan dan memiliki fokus perhatian pada pelaksanaan kebijakan perberasan serta memiliki konsentrasi terhadap pelaksanaan kebijakan perberasan. Berdasarkan kriteria tersebut hasil prasurvei diputuskan penelitian ini menggunakan teknik *purposif sampling* difokuskan pada unsur pemangku kepentingan perberasan yang utama, yakni organisasi tani, pemerintah, asosiasi pengusaha beras dan anggota komisi IV DPR. Jumlah sampel sebanyak 60 responden diambil menggunakan teknik *purposif sampling* dari unsur populasi penelitian, masing-masing 15 reponden dari tiap unsur kelembagaan pemangku kepentingan.

### Analisis Data

Pengolahan data menggunakan analisis statistik deskriptif berupa tabel frekuensi, persentase, rataan dan total rataan skor, dan uji korelasi *rank* Spearman dengan bantuan program SPSS (*Statistical Program for Social Science*) Versi 14.0 (Siegel, 1992).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Karakteristik Personal Pemangku Kepentingan Perberasan

Hasil penelitian pada Tabel 1 menunjukkan bahwa usia responden termuda 29 tahun dan tertua 62 tahun, dengan presentase kelompok usia muda yang berumur di bawah 36 tahun sebanyak 15%, yang terbesar terdapat pada kelompok umur dewasa (66,6%) dan 18,4% berusia tua. Mengacu pada umur produktif menurut Depnakertrans (15-55 tahun), maka sebagian besar responden tergolong pada usia produktif serta matang dalam menjalankan fungsi dan tanggungjawabnya kepada konstituen yang diwakilinya.

Pendidikan formal responden sebagian besar (78%) adalah berpendidikan sarjana, tamat Diploma sebanyak 18% dan sisanya empat persen berpendidikan SLTA. Umumnya responden yang mempunyai jabatan di kalangan pemerintah lebih banyak bergelar Doktor.

Tabel 1. Distribusi sampel menurut karakteristik personal yang diamati

No.	Karakteristik Personal	Kategori Pengukuran	Jumlah (Jiwa)	Persentase (%)
1.	Umur	Muda (<36 Tahun)	9	15,0
		Dewasa (36-55 Tahun)	40	66,6
		Tua (>5 Tahun)	11	18,4
2.	Pendidikan Formal	Rendah (Tamat SLTA)	2	4,0
		Sedang (Tamat Diploma)	11	18,0
		Tinggi (Tamat Sarjana)	47	78,0
3.	Pengemudi Menjabat	Baru (<3 Tahun)	2	3,3
		Cukup Lama (3-4 Tahun)	40	66,7
		Lama (> 4 Tahun)	18	30,0
4.	Pendapatan	Menengah (4,5 Jt - 59,5 Jt)	28	46,7
		Tinggi (60 Jt - 115 Jt)	21	35,0
		Sangat Tinggi (116 Jt - 170 Jt)	11	18,3

Pengalaman menjabat merupakan modal utama dalam memahami suatu persoalan di organisasi. Lamanya pengalaman menjabat menjadi suatu ukuran di dalam mengambil suatu kebijakan atau keputusan yang berkaitan dengan posisinya pada suatu organisasi. Pengalaman menjabat responden yang dilibatkan dalam penelitian, sebagian besar (66,7%) tergolong cukup lama, yaitu antara 3-4 bulan. Sisanya sebanyak 30% tergolong lama dan 3,3% tergolong baru.

Tingkat Pendapatan diukur berdasarkan jumlah uang yang diterima setiap bulan dari berbagai sumber pendapatan, baik sebagai gaji yang didapat dari institusi tempat responden bekerja atau mempunyai usaha sendiri. Mengacu kepada pendapatan domestik regional bruto (PDRB) Jakarta per kapita perbulan berdasarkan harga yang berlaku sebesar Rp 65,79 juta, maka sebanyak 46,7% responden tergolong mempunyai pendapatan menengah, 35% berpendapatan tinggi antara Rp 60 juta Rp115 juta/bulan dan sebanyak 18,3% responden memiliki pendapatan yang tergolong sangat tinggi.

Lebih lanjut hasil penelitian menunjukkan, bahwa tingkat pendapatan terendah ternyata ada pada pemangku kepentingan perberasan dari kalangan organisasi tani, yakni sebesar Rp 4.500.000,- perbulan dan yang tertinggi ada pada komisi IV DPR yakni sebesar Rp 170.000.000,- perbulan.

#### **Karakteristik Situasional Pemangku Kepentingan Perberasan**

Karakteristik situasional yaitu situasi kondisi sosial dan politik yang sedang berlangsung sesuai dengan kebiasaan politik dan realitas sosial politik nasional terkait dengan perkembangan pada pelaksanaan kebijakan perberasan. Komunikasi politik didasarkan pada keadaan yang mempengaruhi berlangsungnya peran komunikasi politik pemangku kepentingan perberasan pada sistem perpolitikan Indonesia. Karakteristik situasional yang diamati dalam penelitian ini yaitu saluran komunikasi politik, partisipasi

politik dan persepsi politik pada pelaksanaan kebijakan perberasan.

Kebijakan perberasan merupakan kebijakan yang sarat dengan muatan kepentingan berbagai pihak, sehingga pelaksanaan kebijakan tersebut harus terbuka dan dapat dikritisi semua pihak. Lembaga legislatif (DPR) memiliki kewajiban untuk mengawasi kinerja eksekutif (pemerintah), organisasi masyarakat atau institusi sosial berkewajiban mengawasi dan memberi masukan terhadap lembaga negara baik eksekutif maupun legislatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa karakteristik situasional yang ada pada masing-masing pemangku kepentingan dalam pelaksanaan kebijakan perberasan mempunyai kondisi dan situasi yang berbeda berdasarkan hasil hitungan rata-rata skor, yang dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Respons politik pada karakteristik situasional

No.	Karakteristik Situasional	Respon Politik*)			
		Organisasi Tani	Pemerintah	Pengusaha Beras	DPR
1.	Saluran Komunikasi Politik	3,13	3,59	3,43	3,31
2.	Partisipasi Politik	3,19	3,37	3,04	3,41
3.	Persepsi Politik	3,25	3,42	3,36	3,36
<b>Rataan Skor</b>		<b>3,19</b>	<b>3,46</b>	<b>3,27</b>	<b>3,36</b>

Keterangan : \*) 1,00 - 1,80 = buruk; 1,81 - 2,60 = kurang; 2,61 - 3,40 = cukup; 3,41 - 4,20 = baik; 4,21 - 5,00 = sangat baik

### Saluran Komunikasi Politik

Saluran komunikasi politik adalah alat dan sarana yang memudahkan penyampaian pesan kepada khalayak. Menurut Nimmo (2001), ada tiga saluran komunikasi politik yaitu; perseorangan kepada banyak orang atau komunikasi massa, perseorangan/komunikasi interpersonal, dan penggabungan perseorangan dengan banyak orang atau komunikasi organisasi.

Organisasi tani dinilai cukup (3,13) di dalam memanfaatkan saluran komunikasi politik. Organisasi tani menggunakan saluran komunikasi politiknya secara kuat hanya ketika ada instrumen kebijakan perberasan dari pemerintah yang dianggap merugikan petani. Seperti jatuhnya harga gabah di tingkat petani, realisasi subsidi benih dan pupuk serta adanya impor beras dalam jumlah besar. Sepanjang kebijakan perberasan berjalan normal maka saluran komunikasi politik yang tersedia tidak digunakan organisasi tani. Sedangkan instrumen pengembangan teknologi dan perbaikan infrastruktur bukan menjadi topik utama yang dikomunikasikan secara politik oleh organisasi tani, sehingga kurang mendapatkan efek komunikasi politik bagi organisasi tani di dalam mendorong pemanfaatan saluran komunikasi politik secara efektif. Padahal, menurut Pearson *et al.*

(2005) yang mengatakan bahwa kondisi pertanian di Indonesia relatif tertinggal karena kurangnya teknologi baru dan sarana prasarana infrastruktur irigasi dan pertanian yang sudah rusak karena salah urus.

Kalangan pemerintah dinilai baik (3,59) dalam memanfaatkan saluran komunikasi politik. Pemerintah dalam hal ini mampu memanfaatkan dengan maksimal berbagai saluran komunikasi politik pemerintah di bidang perberasan. Situasi ini ditunjukkan dengan publikasi dan pemanfaatan media massa dengan menyediakan serta menerbitkan beberapa jenis media sebagai sarana saluran komunikasi politik untuk dapat menjelaskan peran komunikasi politik yang dilakukan. Salah satu yang dilakukan kalangan pemerintah untuk melakukan sosialisasi politik seputar perberasan dan informasi pertanian adalah dengan menerbitkan jenis media cetak seperti "Sinar Tani" yang umumnya sarat dengan isu seputar perberasan dan pertanian. Umumnya setiap pertemuan dengan pemangku kepentingan yang digolongkan formal, seperti pertemuan dengan DKP (dewan ketahanan pangan) dan rapat dengar pendapat dengan komisi IV DPR selalu mendapat peliputan dari media massa yang cenderung menjadi saluran komunikasi politik dalam menyebarluaskan inti pembahasan kebijakan antara pihak yang terkait. Frekuensi pemerintah mendapat liputan yang lebih kuat karena beberapa instrumen kebijakan perberasan lebih banyak menjadi otoritas pemerintah.

Pengusaha beras tergolong baik (3,43) di dalam menyalurkan aspirasi komunikasi politiknya secara intensif dan efektif dengan memanfaatkan saluran komunikasi politik yang tersedia dan dukungan luas (respons kuat) dari anggota. Ini menggambarkan bahwa pengusaha beras pada beberapa instrumen kebijakan memiliki tingkat perhatian yang tinggi seperti melakukan impor beras, pengembangan teknologi dan perbaikan infrastruktur, berbeda dengan pemerintah yang memiliki fokus perhatian pada semua instrumen kebijakan perberasan yang ada. Organisasi pengusaha beras sudah memiliki media massa internal, seperti majalah "Padi" yang terbit tiap bulan, telah membantu pengusaha beras dalam menyosialisasikan beberapa agenda politik mereka pada pelaksanaan kebijakan perberasan.

Dewan Perwakilan Rakyat sebagai lembaga negara yang mengawasi kebijakan pemerintah pada pelaksanaan kebijakan perberasan pada situasi politik perberasan nasional saat ini mengindikasikan tingkat skor cukup (3,31) dalam memanfaatkan saluran komunikasi politik. Hal ini terlihat dari komitmen DPR di dalam memanfaatkan saluran komunikasi politik untuk mengintervensi beberapa instrumen kebijakan yang diputuskan pada pelaksanaan kebijakan perberasan dengan mengundang berbagai elemen pemangku kepentingan pada saat membahas instrumen kebijakan tersebut. Selain itu, anggota dewan cukup memanfaatkan saluran komunikasi politik melalui media massa sebagai sumber informasi utama dalam menyampaikan hasil pembahasan berbagai instrumen kebijakan perberasan. Dengan demikian, untuk meningkatkan komunikasi



politik DPR, maka diperlukan peningkatan frekuensi memanfaatkan saluran komunikasi politik seperti dengan menggunakan media massa.

### **Partisipasi Politik**

Partisipasi politik akan menjadi pertimbangan di dalam merumuskan kebijakan. Partisipasi politik di dalam pelaksanaan kebijakan perberasan adalah bentuk keperdulian dan tingkat responsif secara politik terhadap pelaksanaan kebijakan perberasan.

Partisipasi politik perberasan yang dilakukan oleh organisasi tani menunjukkan skor 3,19. Artinya, organisasi tani memiliki tingkat partisipasi politik yang cukup pada kelima instrumen kebijakan perberasan. Tingkat partisipasi politik yang dilakukan tidak setinggi ketika ada instrumen yang dianggap kontroversial. Partisipasi politik organisasi tani semakin meningkat apabila ada pelaksanaan instrumen yang dianggap ekstrim, seperti impor beras dalam jumlah besar, penerapan HPP yang tidak tepat dan dianggap merugikan petani dan subsidi benih dan pupuk yang tidak tepat waktu. Jika kebijakan tentang hal ini masih berjalan normal maka organisasi tani menempatkan posisinya sebagai organisasi sosial dalam menolong hak-hak petani. Namun, organisasi tani juga terkadang melakukan *pressure* kepada pihak pengambil kebijakan seperti pada persoalan pengembangan teknologi dan perbaikan infrastruktur perberasan. Hal ini menunjukkan bahwa organisasi tani masih tergolong cukup memberikan kontribusinya terhadap penyampaian aspirasi petani.

Partisipasi politik pemerintah pun menunjukkan rata-rata skor cukup (3,37) pada kelima instrumen pelaksanaan kebijakan perberasan dalam situasi politik perberasan nasional. Namun, dengan semakin banyaknya departemen yang mengurus beberapa instrumen kebijakan perberasan menyebabkan peran partisipasi politik pemerintah menjadi tidak kuat karena sebagian besar otoritas instrumen kebijakan perberasan banyak dipengaruhi dan diputuskan melalui masukan beberapa departemen terkait. Selain itu, partisipasi politik pemerintah sebagai pemangku kepentingan perberasan juga dipengaruhi oleh media massa dalam konteks pemberitaan pelaksanaan kebijakan perberasan yang belum kuat terakomodasi karena terhambat birokrasi antar departemen. Akibatnya informasi tentang berbagai kebijakan perberasan menjadi terhambat.

Partisipasi politik yang dilakukan oleh pengusaha beras memiliki tingkatan rata-rata skor 3,04. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi politik pengusaha beras tergolong cukup pada beberapa instrumen yang menjadi fokus kebijakan yang dianggap menguntungkan mereka dalam hal pelaksanaan kebijakan perberasan. Untuk beberapa kebijakan instrumen perberasan seperti penetapan HPP, partisipasi politik pengusaha belum baik, cenderung apatis. Pengusaha beras selama ini cenderung membeli gabah petani di atas harga HPP sehingga terkesan pengusaha beras tidak mendukung berlakunya instrumen tersebut. Pada instrumen yang lain mengindikasikan bahwa partisipasi politik pengusaha

beras tinggi mendukung impor beras, pengembangan teknologi dan perbaikan infrastruktur pada pelaksanaan kebijakan perberasan. Karena dengan suksesnya pelaksanaan instrumen tersebut, memberi nilai tambah keuntungan bagi pengusaha beras.

Partisipasi politik DPR yang terkait dengan pelaksanaan kebijakan perberasan tergolong baik dengan rata-rata skor 3,41. Partisipasi politik Komisi IV DPR semakin tinggi, pada saat sorotan publik semakin tinggi terhadap instrumen kebijakan perberasan yang dilakukan pemerintah, seperti penentuan impor beras, penetapan HPP dan realisasi subsidi benih dan pupuk. Dengan kata lain, DPR juga berupaya mempertahankan citra politik mereka di publik dengan cara berpihak kepada aspirasi petani.

Partisipasi politik komisi IV DPR semakin tinggi dengan semakin banyaknya tuntutan dari publik ke pemerintah untuk segera melakukan perbaikan pada implementasi kebijakan perberasan. Kritik publik kepada pemerintah juga semakin kuat di dalam menentang isu kebijakan perberasan yang tidak memihak ke petani seperti pilihan impor beras.

### **Persepsi Politik**

Persepsi politik adalah pandangan atau pendapat politik dari para pemangku kepentingan terhadap pelaksanaan kebijakan perberasan yang berlaku saat ini. Persepsi politik para pemangku kepentingan perberasan mempunyai tingkatan yang berbeda terhadap lima instrumen pelaksanaan kebijakan perberasan di Indonesia yang meliputi; kebijakan HPP, impor beras, subsidi benih dan pupuk, pengembangan teknologi dan perbaikan infrastruktur. Hal ini dapat dilihat berdasarkan tingkat rata-rata skor masing-masing pemangku kepentingan terhadap lima instrumen kebijakan, dimana kalangan pemerintah dikategorikan baik (3,42) persepsi politiknya. Artinya, kebijakan perberasan yang ditempuh pemerintah sudah sesuai dengan pilihan kebijakan yang dapat dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak, mulai dari tahap penyusunan kebijakan sampai tahap implementasi di lapangan.

Sedangkan, persepsi politik organisasi tani sebagai pemangku kepentingan perberasan terhadap pelaksanaan kebijakan perberasan tergolong cukup (3,25). Organisasi tani memaknai bahwa kebijakan perberasan yang dilakukan pemerintah saat ini, dipersepsikan pada posisi mendukung penerapan HPP, subsidi benih dan pupuk serta larangan impor beras demi mendukung kepentingan petani. Namun, dalam hal pengembangan teknologi dan perbaikan infrastruktur secara politik dipersepsikan masih kurang mendukung kepentingan rakyat. Karena saat ini pengurus organisasi tani melihat infrastruktur khususnya saluran irigasi masih kurang dan lemah di dalam memacu produksi beras nasional. Inti ketidaksetujuan organisasi tani juga terkait dengan ketika mekanisme impor beras dilakukan oleh pemerintah sebagai pilihan mengatasi kekurangan stok beras.

Menurut mereka, hal ini sebenarnya tidak perlu dilakukan karena akan berdampak pada ketidakpastian bagi petani padi di dalam berusaha. Impor beras seharusnya merupakan solusi terakhir di dalam memenuhi kebutuhan beras dalam negeri karena adanya gagal panen dan bencana alam. Selama produksi beras dalam negeri masih mencukupi pemerintah tidak perlu melakukan impor dan sebaiknya melakukan perbaikan infrastruktur dan menerapkan teknologi baru yang dapat memacu produksi beras dalam negeri yang diikuti dengan konsistensi pemerintah di dalam menerapkan HPP terhadap gabah petani ketika musim panen. Untuk memacu produksi beras dalam negeri dan bahkan dapat melakukan ekspor, maka perbaikan infrastruktur irigasi dan membuka lahan persawahan baru adalah hal-hal yang dikemukakan oleh organisasi tani sebagai solusi.

Persepsi politik pengusaha beras terhadap pelaksanaan kebijakan perberasan tergolong cukup (3,36). Kecenderungan persepsi politik pengusaha beras terhadap kebijakan perberasan menunjukkan, bahwa instrumen yang ada selama ini dinilai buruk. Di samping itu, pengusaha beras mendukung pemerintah tetap membuka katup impor beras apabila pemerintah tidak mampu mengupayakan perbaikan sistem pertanian dan perbaikan pada beberapa instrumen dalam pelaksanaan kebijakan perberasan. Alasan lain yang dikemukakan adalah harga beras impor justru lebih murah dibanding dengan harga lokal yang dibeli dari petani. Ketatnya larangan impor seperti saat ini malah justru memberi peluang terjadinya penyeludupan beras di beberapa titik. Sebagai contoh, beberapa pengusaha yang mempunyai pengaruh kekuasaan dan dapat memperoleh ijin impor beras terbatas, ternyata kini sudah mendistribusikannya ke beberapa kota besar. Berdasarkan temuan beberapa pengusaha PERPADI, ternyata beras impor sudah ada yang masuk ke pasar tradisional dan bahkan diijinkan dipasarkan di *Hypermarket* dan pusat perbelanjaan besar. Sebenarnya, menurut beberapa pengusaha beras, nilai pendapatan dan keuntungan akan lebih tinggi apabila mereka turun langsung membeli gabah ke petani. Dengan demikian dapat bersaing dengan harga beras impor yang lebih murah dibanding beras dalam negeri.

Persepsi politik DPR terhadap pelaksanaan kebijakan perberasan menunjukkan rata-rata skor tergolong cukup (3,36) dalam menilai beberapa kebijakan perberasan yang berlaku saat ini. Hal ini terlihat dari kecenderungan anggota DPR di dalam mendukung beberapa instrumen pelaksanaan kebijakan perberasan seperti tetap menerapkan HPP dalam pembelian gabah petani pada situasi panen raya, mendistribusikan benih dan pupuk bersubsidi tepat waktu dan sasaran, dan tidak melakukan impor beras dalam jumlah besar.

Hasil pengamatan anggota DPR dalam kunjungan mereka ke daerah menemukan beberapa kasus kelangkaan pupuk, benih palsu dan beberapa tempat mengalami kekeringan karena rusaknya saluran irigasi. Para anggota DPR mengatakan setuju jika pemerintah tidak melakukan impor beras. Namun dalam kebijakan perbaikan

infrastruktur dan pengembangan teknologi persepsi politik DPR masih lemah. Artinya, anggota DPR berpersepsi bahwa segala sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah dalam menangani kebijakan ini masih dianggap belum baik. Dilihat dari kebijakan stabilitas harga beras tidak memperlihatkan hasil yang diharapkan.

### Peran Komunikasi Politik Pemangku Kepentingan Perberasan

Peran komunikasi politik dilihat dari status, fungsi, keberpihakan dan respons masing-masing pemangku kepentingan terhadap instrumen pelaksanaan kebijakan perberasan. Menurut Rush dan Althoff (2003), peran komunikasi politik adalah sebagai katalisator karena memberikan unsur sarana dinamik dengan nama informasi yang secara politis relevan bisa membentuk orientasi tujuan politik. Dengan demikian, peran komunikasi politik yang dilakukan setiap pemangku kepentingan perberasan lebih berpihak kepada kepentingan konstituen yang diwakilinya. Oleh karena itu, masing-masing pemangku kepentingan menginginkan kepentingannya lebih diutamakan di dalam pelaksanaan instrumen kebijakan perberasan.

Seperti tersaji pada Tabel 3, terlihat bahwa peran komunikasi politik organisasi tani memiliki rata-rata skor untuk penerapan HPP (3,53), melakukan impor (2,58), subsidi benih dan pupuk (3,40), pengembangan teknologi (3,49), perbaikan infrastruktur (3,46). Berarti organisasi tani cukup kuat peran komunikasi politiknya mempengaruhi kebijakan perberasan untuk tetap mempertahankan adanya penerapan instrumen kebijakan HPP.

Tabel 3. Peran komunikasi politik pelaksanaan kebijakan perberasan

No.	Pelaksanaan Kebijakan Perberasan	Peran Komunikasi Politik *)			
		Organisasi Tani	Pemerintah	Pengusaha Beras	DPR
1.	Harga Pembelian Pemerintah	5,53	3,27	3,04	4,11
2.	Melakukan Impor Beras	2,58	3,28	3,70	2,59
3.	Subsidi Benih dan Pupuk	3,40	3,39	3,28	3,17
4.	Pengembangan Teknologi	3,49	4,15	3,39	3,19
5.	Perbaikan Infrastruktur	3,46	4,20	3,55	3,31
<b>Rataan Skor</b>		<b>3,29</b>	<b>3,65</b>	<b>3,39</b>	<b>3,27</b>

Keterangan : \*) 1,00 - 1,80 = Sangat Tidak Setuju; 1,81 - 2,60 = Tidak Setuju; 2,61 - 3,40 = Ragu-ragu; 3,41 - 4,20 = Setuju; 4,21 - 5,00 = Sangat Setuju

Lemah peran komunikasi politiknya untuk memberi dukungan melakukan impor beras, dan cenderung menolak kebijakan impor beras. Selanjutnya peran komunikasi politik yang dilakukan kuat untuk mendukung kebijakan pada realisasi pengembangan teknologi dan perbaikan infrastruktur.

Peran komunikasi pemerintah memiliki rata-rata skor untuk penerapan HPP (3,27), melakukan impor (3,28), subsidi benih dan pupuk (3,39), pengembangan teknologi (4,15) dan perbaikan infrastruktur (4,20). Kalangan pemerintah memiliki kategori sedang dalam mempengaruhi penentuan melakukan impor beras artinya pemerintah berada pada posisi yang mendukung impor beras ketika di dalam negeri sudah berada pada tahap tidak mencukupi produksi dan stok beras di dalam negeri mengkhawatirkan dapat mengganggu stabilitas politik. Selanjutnya dikategorikan kuat dalam mendukung peran komunikasi yang dilakukan dalam perbaikan infrastruktur pada kebijakan perberasan yang ada saat ini.

Peran komunikasi pengusaha beras memiliki rata-rata skor untuk penerapan HPP (3,04), melakukan impor (3,70), subsidi benih dan pupuk (3,28), pengembangan teknologi (3,39), perbaikan infrastruktur (3,55). Pengusaha beras memiliki tingkat paling tinggi nilai rata-ratanya yang mendorong adanya impor beras artinya tinggi peran komunikasi politik yang dilakukan dan cenderung untuk tetap mempengaruhi instrumen kebijakan melakukan impor beras pada pelaksanaan kebijakan perberasan.

Peran komunikasi komisi IV DPR memiliki rata-rata skor untuk penerapan HPP (4,11), melakukan impor (2,59), subsidi benih dan pupuk (3,17), pengembangan teknologi (3,19), perbaikan infrastruktur (3,31). Peran komunikasi politik yang dilakukan komisi IV cukup kuat mempengaruhi mempertahankan penerapan instrumen kebijakan HPP untuk tetap dipertahankan pada pelaksanaan kebijakan perberasan. Peran komunikasi politik komisi IV DPR ditunjukkan dengan mempengaruhi pemerintah melalui rapat kerja dan rapat dengar pendapat dengan mitra kerjanya di pemerintahan setiap dimulainya musim panen. Komisi IV tidak memiliki keinginan untuk melakukan impor beras sehingga peran komunikasi politik yang dilakukan lemah untuk memberi persetujuan untuk melakukan impor beras.

### **Hubungan Karakteristik Personal dengan Peran Komunikasi Politik Pemangku Kepentingan Pada Pelaksanaan Kebijakan Perberasan**

Hasil uji statistik *rank Spearman* pada Tabel 4 menunjukkan bahwa pendidikan formal pemerintah, pengalaman menjabat dan tingkat pendapat responden organisasi tani dan komisi IV DPR berhubungan nyata ( $p < 0,05$ ) dengan peran komunikasi politik pada pelaksanaan kebijakan perberasan. Ini berarti, hipotesis 1 yang menyatakan "Terdapat hubungan nyata antara karakteristik personal dengan peran komunikasi politik pemangku kepentingan perberasan pada pelaksanaan kebijakan perberasan," sebagian diterima.

Tabel 4. Hubungan karakteristik personal dengan peran komunikasi politik pada pelaksanaan kebijakan perberasan

No.	Karakteristik Personal	Peran Komunikasi Politik pada Pelaksanaan Kebijakan Perberasan ( $r_s^*$ )			
		Organisasi Tani	Pemerintah	Pengusaha Beras	DPR
1.	Umur	0,282	-0,050	0,207	0,110
2.	Pendidikan Formal	-0,121	0,500*	0,197	0,437
3.	Pengalaman Menjabat	0,536*	0,153	0,306	0,525*
4.	Pendapatan	-0,478*	-0,124	-0,318	-0,526*

Keterangan : \* taraf nyata pada  $p < 0,05$

$r_s$  = rank Spearman

Jenjang pendidikan ternyata masih menjadi penentu dalam penempatan individu di lembaga pemerintah dan berdampak pada peningkatan peran komunikasi politiknya karena berada pada posisi tersebut. Pada struktur pemerintahan, tingkat pendidikan masih menjadi salah satu indikator dalam menempatkan individu pada posisi tanggungjawab pekerjaannya sehingga sangat dimungkinkan pemberlakuan pendidikan sebagai syarat utama di dalam melakukan komunikasi politik dengan pihak internal dan eksternal. Kondisi ini diperkuat dengan deskripsi karakteristik pendidikan responden di kalangan pemerintah yang sebagian besar berpendidikan sarjana dan pascasarjana. Dimana dengan tingkat pendidikan yang tinggi tersebut, menyebabkan pejabat pemerintah ini menempati posisi atau kedudukan serta jabatan strategis di bidang perberasan nasional.

Sedangkan pada pengusaha beras dan DPR, pendidikan formal tidak berhubungan nyata ( $p > 0,05$ ) dengan peran komunikasi politik perberasan. Bahkan pendidikan formal responden organisasi tani berkorelasi negatif, yang artinya walaupun hubungannya tidak signifikan terlihat bahwa semakin tinggi pendidikan personal organisasi tani maka semakin rendah peran komunikasi politik perberasannya. Hal ini bisa dipahami, karena tingkat pendidikan formal responden kalangan organisasi tani, pengusaha beras dan komisi IV DPR tidak dijadikan prasyarat utama untuk mereka berkontribusi memainkan peran komunikasi politik perberasan. Secara umum dalam politik maupun organisasi masyarakat, tingkat pendidikan formal tidak menjadi syarat mutlak untuk menjadi anggota atau pengurus. Demikian pula dalam UU partai politik, menjadi anggota dewan, gubernur, bupati dan bahkan presiden hanya mensyaratkan lulusan SMU. Bahkan pada pemilu 2004 untuk menjadi anggota legislatif, KPU tetap meloloskan yang berpendidikan formal setara SLTP. Sehingga untuk organisasi massa dan partai politik, strata pendidikan tidak menjadi ukuran mutlak dalam penempatan posisi atau jabatan. Namun yang lebih menentukan peran dalam politik adalah adanya dukungan politik dari massa dan konstituennya. Seperti, Megawati menjadi presiden maupun Harmoko menjadi ketua MPR cukup dengan ijazah SLTA. Artinya kemampuan dan

penguasaan keahlian dalam komunikasi politik dan kepemimpinan yang lebih utama dalam melakukan peran komunikasi politik dibanding pendidikan formal yang tinggi.

Pengalaman menjalankan suatu peran dalam masyarakat masih menjadi penentu pada bidang-bidang tertentu di berbagai kehidupan masyarakat. Lama seseorang dalam menjalankan profesi yang selama ini digeluti berhubungan dengan tingkat penguasaan yang dilakukan. Begitu pula pengalaman lamanya menjabat tidak selalu menjadi penentu tingginya peran komunikasi politik yang dilakukan oleh pengusaha beras dan kalangan pemerintah. Namun tidak demikian dengan organisasi tani dan anggota DPR. Hasil penelitian yang dilakukan Jauhari (2004) menyatakan bahwa semakin lama periodisasi menjadi anggota dewan, menyebabkan perilaku komunikasi politik semakin akomodatif dan tinggi tingkat penyaluran aspirasi mereka pada pembahasan legislasi UU. Hal ini disebabkan karena aksesibilitas responden terhadap lingkungan internal dan eksternal lembaga legislatif lebih banyak dibanding dengan mereka yang baru pertama menjadi anggota dewan.

Peubah pendapatan pada karakteristik personal berhubungan nyata ( $p < 0,05$ ) negatif dengan peran komunikasi politik yang dilakukan oleh organisasi tani dan komisi IV DPR. Artinya, semakin tinggi pendapatan yang dimiliki oleh responden organisasi tani dan DPR, maka peran komunikasi politik yang dilakukan pada pelaksanaan perberasan semakin menurun. Dengan kata lain, semakin besar pendapatan per bulan pengurus organisasi tani dan anggota komisi IV DPR menyebabkan peran komunikasi politik mereka untuk melakukan lobi, mediasi, advokasi maupun kontrol terhadap kebijakan pemerintah di dalam perberasan cenderung menurun. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa pendapatan pengurus organisasi tani maupun anggota legislatif yang tinggi bukan semata-mata diperoleh dari aktivitasnya sebagai pengurus organisasi tani dan anggota dewan. Hal itulah yang menyebabkan pengalokasian pendapatan mereka yang tinggi tersebut tidak digunakan (berkorelasi negatif) untuk mengkomunikasikan berbagai aspirasi yang berpihak kepada kepentingan petani. Pendapatan yang tinggi bukan menjadi faktor penentu dalam memotivasi pekerjaan dan tugas yang diembankan oleh pengurus organisasi tani dan anggota DPR, termasuk dalam melaksanakan kelima aspek peran komunikasi politik perberasan.

Walaupun peubah pendapatan tidak berhubungan nyata ( $p > 0,05$ ) dengan peran komunikasi politik yang dilakukan pejabat pemerintah di bidang perberasan dan pengusaha beras dalam pelaksanaan kebijakan perberasan, tetapi hubungan positif masih terlihat antar kedua peubah. Seperti halnya, pejabat pemerintah sebagai pengatur utama kebijakan perberasan mempunyai tanggungjawab di dalam mengemban tugas tersebut. Untuk itu mereka diberi insentif (pendapatan) yang secara resmi sudah diatur dalam peraturan yang ada. Begitu pula, pengurus asosiasi pengusaha beras sebagai suatu organisasi mempunyai tugas dan wewenang memainkan peran komunikasi politik pada

pelaksanaan kebijakan perberasan. Penghasilan mereka cenderung tinggi dari bisnis beras, tidak secara otomatis memudahkan pengurus asosiasi pengusaha beras memberikan respons optimal memainkan peran komunikasi politik kebijakan perberasan.

### Hubungan Karakteristik Situasional dengan Peran Komunikasi Politik Pemangku Kepentingan pada Pelaksanaan Kebijakan Perberasan

Karakteristik situasional yang diamati dalam penelitian ini yaitu aspek saluran komunikasi politik, partisipasi politik dan persepsi politik. Untuk menguji derajat hubungannya dengan peran komunikasi politik pemangku kepentingan perberasan pada pelaksanaan kebijakan perberasan menggunakan uji *rank Spearman*. Hasil analisis hubungan karakteristik situasional dengan peran komunikasi politik pemangku kepentingan pada pelaksanaan kebijakan perberasan dapat dilihat pada Tabel 5 dan sebagian besar Hipotesis H<sub>2</sub> diterima.

Tabel 5. Hubungan karakteristik situasional dengan respons peran komunikasi politik pada pelaksanaan kebijakan perberasan

No.	Karakteristik Situasional	Peran Komunikasi Politik pada Pelaksanaan Kebijakan Perberasan ( <i>r<sub>s</sub></i> )			
		Organisasi Tani	Pemerintah	Pengusaha Beras	DPR
1.	Saluran Komunikasi Politik	0,148	0,401**	0,091	0,356**
2.	Partisipasi Politik	0,348**	0,309**	0,556**	0,331**
3.	Persepsi Politik	0,296**	0,558**	0,284*	0,062

Keterangan : \* Nyata pada  $p < 0,05$

\*\* Sangat nyata pada  $p < 0,01$

*r<sub>s</sub>* = rank Spearman

Hasil penelitian menunjukkan bahwa karakteristik situasional terutama saluran komunikasi politik berhubungan sangat nyata ( $p < 0,01$ ) dengan peran komunikasi politik pada pelaksanaan kebijakan perberasan oleh pemerintah dan DPR. Ini berarti semakin tinggi memanfaatkan saluran komunikasi politik yang dilakukan oleh responden pemerintah dan DPR, maka peran komunikasi politiknya pada pelaksanaan perberasan semakin tinggi. Kondisi ini dapat dikemukakan bahwa tumbuhnya berbagai saluran komunikasi politik pada situasi politik nasional mempermudah aksesibilitas pemanfaatan saluran komunikasi politik untuk menyampaikan aspirasi ataupun dalam sosialisasi pelaksanaan kebijakan perberasan. Analisis ini diperkuat bahwa kalangan pemerintah dan DPR merupakan pusat informasi utama pada pelaksanaan kebijakan perberasan. Kalangan media massa sendiri lebih optimal dalam menyalurkan informasi kepada khalayak dengan mengambil sumber utamanya dari pemerintah dan DPR. Selanjutnya tingkat intensitas pertemuan antara DPR dan pemerintah lebih sering terjadi dengan mekanisme rapat kerja dan pertemuan formal sebagai mitra kerja antara legislatif dan eksekutif dalam lingkup hubungan tatanegara di Indonesia. Sehingga frekuensi



memanfaatkan saluran komunikasi politik masing-masing kelembagaan lebih optimal dimanfaatkan. Untuk kalangan organisasi tani dan pengusaha beras mekanisme memanfaatkan saluran komunikasi politik terbatas tingkat frekuensinya, yakni hanya ketika ada pertemuan resmi seperti pertemuan wadah DKP dan rapat dengar-pendapat dengan DPR. Inilah yang menjadi indikator lemahnya organisasi tani dan pengusaha beras dalam memanfaatkan saluran komunikasi politik pada situasi politik nasional.

Untuk karakteristik situasional, partisipasi politik seperti yang disajikan pada Tabel 5 mengungkapkan bahwa semua pemangku kepentingan perberasan memiliki partisipasi politik yang tinggi dalam menyuarakan aspirasi yang berkembang dimasing-masing kelembagaan. Hal ini juga menunjukkan bahwa semua pemangku kepentingan memiliki pandangan yang sama bahwa dalam pelaksanaan instrumen kebijakan yang selama ini berlangsung bentuk partisipasi politik yang dilakukan memiliki hubungan sangat nyata ( $p < 0.01$ ) dengan tingkat frekuensi peran komunikasi politik yang diaktualisasikan guna perbaikan beberapa implementasi kebijakan yang selama ini ada. Hal ini menggambarkan bahwa semakin kuat partisipasi politik yang dilakukan memiliki hubungan pada tingginya peran komunikasi politik yang dilakukan sehingga dengan kewenangan dan fungsi yang ada pada komisi IV DPR berkolerasi positif terhadap perbaikan implementasi pada pelaksanaan kebijakan perberasan yang selama ini dijalankan.

Analisis persepsi politik pada Tabel 5 menyebutkan, bahwa persepsi politik organisasi tani dan pemerintah berhubungan sangat nyata ( $p < 0,01$ ) dan pengusaha beras berhubungan nyata ( $p < 0,05$ ) dengan peran komunikasi politik pada pelaksanaan kebijakan perberasan. Bagi organisasi tani, pemerintah dan pengusaha beras semakin tinggi persepsi politiknya menilai kelemahan implementasi kebijakan, maka semakin tinggi juga peran komunikasi politik yang dilakukan pada pelaksanaan kebijakan perberasan guna mendukung perbaikan beberapa implementasi instrumen kebijakan yang ada. Persepsi politik komisi IV DPR tidak berhubungan nyata ( $p > 0,05$ ) dengan peran komunikasi politik yang dilakukan pada pelaksanaan kebijakan perberasan. Hal ini juga memperkuat sinyalemen bahwa persepsi politik tidak selamanya akan diikuti dengan tindakan bentuk perilaku komunikasi politik yang mengarah seperti dalam melakukan komunikasi politik dan berkontribusi adanya kebijakan yang berpihak pada konstituen komisi IV DPR yaitu petani padi. Persepsi akan cepat berubah sesuai dengan pandangan dan analisa terhadap berjalannya suatu kebijakan dalam waktu periode tertentu. Umumnya persepsi politik anggota komisi IV DPR dari kalangan partai pendukung pemerintah cenderung mendukung kebijakan pelaksanaan perberasan yang saat ini berlaku. Sebaliknya anggota komisi IV DPR yang berada di luar pemerintahan memiliki persepsi politik menolak bentuk implementasi kebijakan yang berlaku. Selanjutnya tindakan politik kalangan legislatif tinggi pada persoalan perberasan umumnya setelah ada desakan dari publik.

## SIMPULAN DAN SARAN

### Simpulan

1. Secara umum tingkat usia responden tergolong produktif, berpendidikan tinggi, pengalaman menjabat cukup lama dan tingkat pendapatan kategori menengah. Terdapat perbedaan respons politik pada karakteristik situasional antar masing-masing pemangku kepentingan perberasan, untuk aspek pemanfaatan saluran komunikasi politik pada organisasi tani dan DPR terlihat baik, tingkat partisipasi politik hanya DPR yang masuk kategori baik, sedangkan persepsi politik yang baik hanya di kalangan pemerintah
2. Peran komunikasi politik pemangku kepentingan khususnya pemerintah masih lebih dominan dan tergolong kategori kuat dibandingkan organisasi tani, pengusaha beras dan komisi IV DPR pada pelaksanaan kebijakan perberasan.
3. Karakteristik personal yang berhubungan nyata dengan peran komunikasi politik kebijakan perberasan adalah pendidikan formal pemangku kepentingan pemerintah, pengalaman menjabat dan tingkat pendapatan pemangku kepentingan organisasi tani dan komisi IV DPR. Sedangkan Karakteristik situasional, saluran komunikasi politik pemangku kepentingan pemerintah dan komisi IV DPR, partisipasi politik semua pemangku kepentingan berhubungan sangat nyata, dan hanya persepsi politik pemangku kepentingan komisi IV DPR yang tidak berhubungan nyata dengan peran komunikasi politik pada pelaksanaan kebijakan perberasan.

### Saran

1. Pendidikan dan pengalaman diperlukan dalam memperkuat peran komunikasi politik. Para pemangku kepentingan perberasan perlu meningkatkan partisipasi politiknya dengan memanfaatkan saluran komunikasi politik yang tersedia sehingga persepsi politik yang buruk atas pelaksanaan kebijakan perberasan dapat dikomunikasikan dengan baik.
2. Untuk pemangku kepentingan perberasan organisasi tani, pengusaha beras dan komisi IV DPR perlu meningkatkan peran komunikasi politik guna mengimbangi dominasi kalangan pemerintah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, A. 2003. *Komunikasi Politik, Paradigma-Teori-Aplikasi-Strategi Komunikasi Politik Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta.
- Budiharsono, S.S. 2003. *Politik Komunikasi*. Grasindo, Jakarta.
- Deptan. 2004. "Revitalisasi Pertanian, Perkebunan Kehutanan dan Kelautan." Badan Ketahanan Pangan. Departemen Pertanian RI, Jakarta.
- Jauhari, A. 2004. "Peranan Komunikasi Politik dalam Proses Legislasi, Kasus Pada Pembahasan UU No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman di Komisi-III DPR RI". Tesis. SPs IPB, Bogor.
- Levis, L.R. 1996. *Komunikasi Penyuluhan Pedesaan*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Nimmo, D. 2001. *Komunikasi Politik Khalayak dan Efek*. Remaja Rosda Karya, Bandung.
- Siegel, S. 1992. *Statistik Nonparametrik Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Gramedia, Jakarta.
- Pearson S., Gotsch C. dan Bahri S. 2005. *Aplikasi Policy Analysis Matrix Pada Pertanian Indonesia*. Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Rush, M. dan P. Althoff. 2003. *Pengantar Sosiologi Politik*. Rajawali, Jakarta.

## Salam Redaksi

Mediakom Volume 2 Nomor 3 - Februari 2009 memuat 5 (lima) tulisan baik hasil penelitian maupun kajian pustaka. Terbitan edisi ini lebih banyak memuat tulisan tentang komunikasi politik dan media massa. Hal ini selaras dengan masa-masa kampanye partai politik yang tengah berlangsung pada Bulan Februari 2009 ini.

Redaksi berharap dengan tulisan-tulisan yang dimuat Mediakom kali ini, dapat menjadi referensi tambahan bagi semua pihak. Semoga tulisan ini dapat memperkaya khasanah keilmuan komunikasi secara umum.

Redaksi mediakom mengucapkan terimakasih kepada para penulis yakni : Heri Budianto, Umaemah Wahid, Afdhal Makkuraga Putra, Amirudin Saleh, dan Endah Murwani yang telah mengirimkan tulisannya untuk dimuat pada terbitan kali ini. Tak lupa pula redaksi mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah mendukung Mediakom sehingga dapat menerbitkan Volume 2 Nomer 3-Februari 2009.

Redaksi menyadari masih banyak kekurangan dan kelemahan baik dari tema, isi, tulisan dan tampilan Mediakom. Karena itu, kami mengharapkan masukan, saran, dan kritik yang konstruktif bagi pengembangan Mediakom kedepan. Terimakasih.

Jakarta, Februari 2009

Redaksi

## Redaksi

Penanggung Jawab :  
**Rektor Universitas Mercu Buana**  
**Direktur Program Pasca Sarjana**

Pemimpin Redaksi :  
**Dr. Andy Corry Wardani**

Dewan Redaksi :  
**Dr. Zaim Uchrowi**  
(Universitas Mercu Buana)  
**Prof. Dr. Burhan Bungin**  
(UNTAG Surabaya)  
**Dr. Engkus Kuswarno**  
(Universitas Padjajaran)  
**Dr. Lelly Arianie**  
(Universitas Bengkulu)  
**Dr. Umaemah Wahid**  
(UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)

Redaktur Pelaksana :  
**Heri Budianto, S.Sos., M.Si.**

Sekretaris Redaksi :  
**Rosana Safitri, S.Sos.**

Desain/Layout :  
**Hesti**

Tata Usaha dan Sirkulasi :  
**Sitti Rahman, SP., MM.**  
**Yuni Yuningsih, AMD**  
**Harneti Santi, SE.**

Alamat Redaksi :  
**Gedung Tedja Buana Lt. 4**  
**Jl. Menteng Raya No. 29**  
**Jakarta Pusat**  
Phone (021) 31935454 / 31934474  
Fax. (021) 31934474  
Email :  
[jurnal\\_komunikasi@mercubuana.ac.id](mailto:jurnal_komunikasi@mercubuana.ac.id)

